

**RENCANA KERJA PERUBAHAN  
TAHUN 2023  
DINAS PUPRPERKIM KAB. BALANGAN**



**ALAMAT : JL. A. YANI KM.4 NO.14 KEL. BATUPIRING KEC. PARINGIN SELATAN**

**KODE POS 71600**

## KATA PENGANTAR

Rencana Kerja Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) yang selanjutnya disebut sebagai Renja SOPD merupakan bagian dari pelaksanaan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), sebagaimana yang diamanatkan dalam peraturan menteri dalam negeri nomor 27 Tahun 2014, dimana RKPD (Rencana Kerja Perangkat Daerah) dapat direvisi dan diubah dalam hal ini dikatakan tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dalam tahun berjalan sehingga sesuai dengan hirarki perencanaan maka harus dan perlunya disusun Rencana Kerja Perubahan.

Dalam rangka menyikapi perkembangan pembangunan dan kebutuhan masyarakat khususnya dibidang sumber daya air (SDA), air minum, persampahan, air limbah, drainase, permukiman, bangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungannya, jalan, jasa konstruksi dan penataan ruang, perumahan, kawasan permukiman, perumahan dan kawasan permukiman kumuh, prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU), sertifikasi, kualifikasi dan registrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman serta dengan mempertimbangkan target dan capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman pada Renstra SOPD yang harus dicapai pada tahun 2023 maka Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman TA. 2023 perlu dilakukan perubahan/revisi dalam upaya penyesuaian terhadap Rencana Capaian Kinerja SOPD.

Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Balangan Tahun 2023 disusun dengan berpedoman pada Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026 Dan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang telah ditetapkan menjadi Peraturan Kepala Daerah.

Dengan tersusunnya Rencana Kerja Perubahan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Balangan Tahun 2023 ini diharapkan kinerja organisasi dapat menunjang pelaksanaan pembangunan dengan peningkatan kualitas SDM Aparat dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta peningkatan sarana dan prasarana sehingga kegiatan yang berbasis kinerja dapat dicapai secara optimal guna terwujudnya Balangan yang Mandiri dan Sejahtera.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum,  
Penataan Ruang, Perumahan Rakyat  
& Kawasan Permukiman  
Kabupaten Balangan



**RAHMADIAH,ST,MT**  
**NIP. 19760309 200604 2 007**

# DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Landasan Hukum.....	1
C. Maksud dan Tujuan.....	2
D. Sistematika Penulisan.....	2
<b>BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SAMPAI DENGAN TRIWULAN II</b>	
A. Evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sampai dengan triwulan II .....	4
<b>BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SKPD</b>	
A. Program dan kegiatan baru pada Renja perubahan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2021 .....	16
<b>BAB IV PENUTUP</b>	



## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah Dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah ( RENJA SOPD ) untuk periode jangka pendek satu tahun ke depan dan sebagai acuan dalam penyelenggaraan tugas, pokok dan fungsi SOPD, Rencana Kerja SOPD merupakan penjabaran dari dokumen RENSTRA SOPD dan salah satu komponen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah ( AKIP ). Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Balangan Tahun 2023 disusun mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dengan tetap memperhatikan kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2023.

Proses penyusunan Renja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2023 didasarkan kepada Renstra Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2021-2026 dengan tetap memperhatikan program prioritas yang telah dituangkan di dalam Dokumen rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( Ranwal RKPD ) Tahun 2023.

Adapun alasan yang mendasari dilakukan perubahan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman tahun 2023 adalah:

- a. Penyesuaian target berdasarkan perkembangan terkini
- b. Perubahan karena adanya varian SiLPA

- c. Perkembangan yang tidak sesuai dengan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah;
- d. Adanya penambahan dan pengurangan kegiatan;
- e. Adanya pergeseran anggaran antar kegiatan, program maupun antar jenis belanja.

## **B. LANDASAN HUKUM**

Peraturan perundang-undangan yang melatar belakangi penyusunan Renja Perubahan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Balangan Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 08 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015.
3. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2009 tentang RPJPD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2005 -2025.
4. PERMENDAGRI 13/2006 BAB VIII tentang PERUBAHAN APBD
5. PP 58/2005 Bagian Kedua tentang Perubahan APBD
6. UU32/2004 Paragraf Kedelapan tentang Perubahan APBD

## **C. MAKSUD DAN TUJUAN**

Rencana kerja perubahan ( Renja – P ) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Balangan Tahun 2023 disusun dengan maksud untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai rencana kegiatan/program

pembangunan, kebijakan serta prioritas kegiatan di bidang sumber daya air (SDA), air minum, persampahan, air limbah, drainase, permukiman, bangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungannya, jalan, jasa konstruksi, dan penataan ruang, perumahan, kawasan permukiman, perumahan dan kawasan permukiman kumuh, prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU), sertifikasi, kualifikasi dan registrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman untuk perubahan Tahun Anggaran 2023 sebagai penjabaran dari pelaksanaan Renstra Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2016-2021.

Tujuan disusunnya Rencana Kerja Perubahan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Tahun 2023 ini adalah sebagai penyempurnaan Rencana Kerja Tahun 2023. Perubahan Renja disusun untuk menyesuaikan perubahan program dan kegiatan yang tertuang pada Perubahan RKPD 2023, dalam upaya percepatan pencapaian indikator kinerja SOPD yang telah ditetapkan karena perubahan kondisi dan permasalahan yang dihadapi.

#### **D. SISTEMATIKA PENULISAN**

Sistematika penulisan rencana kerja perubahan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Balangan Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

##### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan rencana kerja perubahan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Balangan yang meliputi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan, sehingga substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.



- BAB II : EVALUASI RENJA SAMPAI TRIWULAN II TAHUN 2023  
Berisi tentang evaluasi pelaksanaan renja sampai triwulan II tahun 2023 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Balangan.
- BAB III : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SKPD  
Berisi tentang program dan kegiatan baru pada rencana kerja perubahan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan kawasan permukiman Kabupaten Balangan Tahun 2023.
- BAB IV : PENUTUP  
Menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.

**BAB II**  
**EVALUASI RENJA DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG,  
PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SAMPAI DENGAN  
TRIWULAN II TAHUN 2023**

**2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman sampai dengan triwulan II Tahun 2023**

**- Capaian Kinerja Sampai Dengan Juni Tahun 2023**

Sebagaimana telah diuraikan diatas, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Balangan pada tahun 2023 mencakup 14 Program, 27 Kegiatan dan 55 sub kegiatan. Program, Kegiatan dan sub kegiatan tersebut dilaksanakan dalam rangka terealisasinya sasaran stratejik.

Uraian selengkapnya capaian kinerja perindikator sampai dengan bulan Juni 2023 sebagai berikut:

**1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH  
KABUPATEN/KOTA**

**a. Kegiatan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah**

**Sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah**

**Pagu anggaran :** Rp. 71.750.000,- dengan realisasi anggaran Rp. 60.386.500,- (84,16%) dan sisa anggaran Rp. 11.363.500,-

**Realisasi kinerja:** Untuk sub kegiatan penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah realisasi capaian kinerja sebesar 50,00% yang terdiri dari penyusunan dokumen rencana kerja tahun 2023

**Sub kegiatan Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD**

**Pagu anggaran :** Rp. 32.890.000,- dengan realisasi anggaran Rp. 4.000.000,- (12,16%) dan sisa anggaran Rp. 28.890.000,-

**Realisasi kinerja :** Untuk sub kegiatan koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD sebesar 50% yaitu tersusunnya laporan LPPD Dinas PUPRPERKIM.

**b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**

**Sub kegiatan Penyediaan gaji dan tunjangan ASN**

**Pagu anggaran :** Rp. 10.059.476.951,- dengan realisasi anggaran Rp. 5.449.162.605,- (54,17%) dan sisa anggaran Rp. 4.610.314.346,-

**Realisasi kinerja:** Untuk sub kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN realisasi capaian kinerja sebesar 100% yang terdiri dari pembayaran gaji ASN dan tunjangan ASN.

**Sub kegiatan Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD**

**Pagu anggaran :** Rp. 19.174.916,- dengan realisasi anggaran Rp. 6.966.172,- (36,33%) dan sisa anggaran Rp. 12.208.744,-

**Realisasi kinerja :** Untuk sub kegiatan pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD realisasi capaian kinerja sebesar 50,00% yang terdiri dari pembayaran BJPS gaji para THL.

**Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD**

**Pagu anggaran :** Rp. 628.620.000,- dengan realisasi anggaran Rp. 43.973.350,- (7,00%) dan sisa anggaran Rp. 584.646.650,-

**Realisasi kinerja :** Untuk sub kegiatan koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD realisasi capaian kinerja sebesar 33,33% yang terdiri dari penyusunan dokumen laporan keuangan SKPD tahun 2022

- c. Kegiatan Administrasi kepegawaian perangkat daerah**  
**Sub kegiatan pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya**  
**Pagu anggaran :** Rp. 68.250.000,- dengan realisasi anggaran Rp. 40.880.000,- (59,90%) dan sisa anggaran Rp. 27.370.000,-  
**Realisasi kinerja :** Untuk sub kegiatan pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya realisasi capaian kinerja sebesar 100,00% yang terdiri dari belanja pakaian sasirangan.  
**Sub kegiatan bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan**  
**Pagu anggaran :** Rp. 505.899.000,- dengan realisasi anggaran Rp. 64.279.543,- (12,71%) dan sisa anggaran Rp. 441.619.457,-  
**Realisasi kinerja :** Untuk sub kegiatan bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan realisasi capaian kinerja sebesar 6,06% yang terdiri dari terlaksananya para ASN Dinas yang ikut bimtek.
- d. Kegiatan Administrasi umum perangkat daerah**  
**Sub Kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor**  
**Pagu anggaran :** Rp. 245.304.000,- dengan realisasi anggaran Rp. 0,- (0%) dan sisa anggaran Rp. 245.304.000,-  
**Realisasi kinerja :** Untuk sub kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor realisasi capaian kinerja sebesar 0,00%.  
**Sub kegiatan penyediaan bahan logistic kantor**  
**Pagu anggaran :** Rp. 135.560.000,- dengan realisasi anggaran Rp. 41.267.000,- (30,44%) dan sisa anggaran Rp. 94.293.000,-  
**Realisasi kinerja :** Untuk sub kegiatan penyediaan bahan logistic kantor realisasi capaian kinerja sebesar 50,00% yang terdiri dari penyediaan makanan dan minuman rapat selama 6 bulan.=  
**Sub kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan**  
**Pagu anggaran :** Rp. 500.558.500,- dengan realisasi anggaran Rp. 73.116.350,- (14,61%) dan sisa anggaran Rp. 427.441.650,-

**Realisasi kinerja** : Untuk sub kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan realisasi capaian kinerja sebesar 50,00% yang terdiri dari penyediaan barang cetakan dan penggandaan untuk kebutuhan kantor.

**Sub kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan**

**Pagu anggaran** : Rp. 24.400.000,- dengan realisasi anggaran Rp. 3.930.000,- (16,11%) dan sisa anggaran Rp. 20.470.000,-

**Realisasi kinerja** : Untuk sub kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan realisasi capaian kinerja sebesar 50,00% yang terdiri dari belanja langganan surat kabar dan majalan selama 6 bulan.

**Sub kegiatan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD**

**Pagu anggaran** : Rp. 1.035.820.000,- dengan realisasi anggaran Rp. 375.739.267,- (36,27%) dan sisa anggaran Rp. 660.080.733,-

**Realisasi kinerja** : Untuk sub kegiatan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD realisasi capaian kinerja sebesar 50,00% yang terdiri dari terlaksananya perjalanan dinas dalam maupun luar daerah selama 6 bulan.

**e. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**

**Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan**

**Pagu anggaran** : Rp. 550.000.000,- dengan realisasi anggaran Rp. 506.100.000,- (92,02%) dan sisa anggaran Rp. 43.900.000,-

**Realisasi kinerja** : Untuk sub kegiatan pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan realisasi capaian kinerja sebesar 100% yang terdiri pengadaan kendaraan operasional sebanyak satu buah.

**Sub Kegiatan Pengadaan Alat Besar**

**Pagu anggaran** : 4.650.000.000,- dengan realisasi anggaran Rp. 0,- (0,00%) dan sisa anggaran Rp. 4.650.000.000,-

**Realisasi kinerja** : Untuk sub kegiatan pengadaan alat besar realisasi capaian kinerja sebesar 0% karena belum masih dalam proses pemesanan barang.

**f. Kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**

**Sub kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik**

**Pagu anggaran** : Rp. 678.000.000,- dengan realisasi anggaran Rp. 180.116.041,- (26,57%) dan sisa anggaran Rp. 497.883.959,-

**Realisasi kinerja** : Untuk sub kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik realisasi capaian kinerja sebesar 50,00% yang terdiri dari pembayaran listrik, PDAM dan internet selama 6 bulan.

**Sub kegiatan penyediaan jasa pelayanan umum kantor**

**Pagu anggaran** : Rp. 1.228.362.100,- dengan realisasi anggaran Rp. 244.472.300,- (19,90%) dan sisa anggaran Rp. 983.889.800,-

**Realisasi kinerja** : Untuk sub kegiatan penyediaan jasa pelayanan umum kantor realisasi capaian kinerja sebesar 50,00% yang terdiri dari penyediaan alat tulis kantor untuk keperluan kantor selama 6 bulan.

**g. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

**Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan**

**Pagu anggaran** : Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan dengan jumlah anggaran Rp.

650.777.450,- dengan realisasi anggaran Rp. 120.642.279,- (18,54%) dan sisa anggaran Rp. 530.135.171,-

**Realisasi kinerja** : Untuk sub kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan realisasi capaian kinerja sebesar 44,44% yang terdiri dari penyediaan bahan bakar minyak, penggantian suku cadang dan belanja servis kendaraan operasional dinas selama 6 bulan.

**Sub Kegiatan Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya**

**Pagu anggaran** : pemeliharaan perakatan dan mesin lainnya dengan jumlah anggaran Rp. 142.467.500,- dengan realisasi anggaran Rp. 1.525.000,- (1,07%) dan sisa anggaran Rp. 140.942.500,-

**Realisasi kinerja** : Untuk sub kegiatan pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya realisasi capaian kinerja sebesar 0,00% karena masih dalam proses perencanaan.

**Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya**

**Pagu anggaran** : pemeliharaan /rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya dengan jumlah anggaran Rp. 1.356.015.750,- dengan realisasi anggaran Rp. 163.061.600,- (12,03%) dan sisa anggaran Rp. 1.192.954.150,-

**Realisasi kinerja** : Untuk sub kegiatan pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya realisasi capaian kinerja sebesar 0,00% karena masih dalam proses perencanaan.

## 2. PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)

### a. Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

#### **Sub Kegiatan Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya**

**Pagu anggaran :** Pembangunan embung dan penampung air lainnya Rp. 3.440.190.000,- dengan realisasi anggaran Rp. 188.272.000,- (5,47%) dan sisa anggaran Rp. 3.251.918.000,-

**Realisasi kinerja :** Untuk sub kegiatan pembangunan embung dan penampung air lainnya realisasi capaian kinerja sebesar 12,50% kegiatan ini sebanyak 1 buah embung sudah selesai dibangun

#### **Sub Kegiatan Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing**

**Pagu anggaran :** Sub kegiatan Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing Rp. 20.620.707.100,- dengan realisasi anggaran Rp. 4.167.653.959,- (20,21%) dan sisa anggaran Rp. 16.453.053.141-

**Realisasi kinerja :** Untuk sub kegiatan pembangunan bangunan perkuatan tebing realisasi capaian kinerja sebesar 20,00% sebanyak 20 meter perkuatan tebing yang di bangun.

#### **Sub kegiatan Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir**

**Pagu anggaran :** Rp, 1.155.120.000,- dengan realisasi anggaran Rp. 49.630.000,- (4,30%) dan sisa anggaran Rp. 1.105.490.000,-

**Realisasi kinerja :** Untuk sub kegiatan rehabilitasi pintu air/bendung pengendali banjir realisasi capaian kinerja sebesar 0,00% karena masih proses pekerjaan fisik berlangsung.

#### **Sub kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota**

**Pagu anggaran :** Sub kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota Rp.



276.640.800,- dengan realisasi anggaran Rp. 79.642.000,- (28,79%) dan sisa anggaran Rp. 196.998.800,-

**Realisasi kinerja** : Untuk sub kegiatan pembinaan dan pemberdayaan kelembagaan pengelolaan SDA kewenangan Kabupaten/Kota realisasi capaian kinerja sebesar 50,00% yang terdiri dari terlaksananya pembinaan pada kelembagaan SDA telah dilaksanakan sebanyak 25 orang yang mengikuti pembinaan dan pemberdayaan yang diadakan oleh bidang SDA.

**b. Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**

**Sub kegiatan Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan**

**Pagu anggaran** : Sub kegiatan Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan Rp. 4.285.110.000, dengan realisasi anggaran Rp. 49.167.500,- (1,15%) dan sisa anggaran Rp. 4.235.942.500,-

**Realisasi kinerja** : Untuk sub kegiatan peningkatan jaringan irigasi permukaan realisasi capaian kinerja sebesar 0,00% karena masih proses perencanaan.

**Sub Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan**

**Pagu anggaran** : Sub kegiatan rehabilitasi jaringan irigasi permukaan Rp. 4.136.020.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.292.550.000 (7,07%) dan sisa anggaran sebesar Rp. 3.843.470.000,-

**Realisasi kinerja** : Untuk sub kegiatan rehabilitasi bendung irigasi realisasi capaian kinerja sebesar 0,00% karena masih dalam proses perencanaan.

**Sub kegiatan Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi permukaan**

**Pagu anggaran** : Sub kegiatan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi permukaan Rp. 2.654.181.300,- dengan realisasi anggaran

sebesar Rp. 21.000.000,- (0,79%) dan sisa anggaran sebesar Rp. 2.633.181.300,-

**Realisasi kinerja** : Untuk sub kegiatan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi permukaan realisasi capaian kinerja sebesar 0,00% karena masih dalam proses perencanaan.

### **3. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**

#### **a. Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota**

##### **Sub kegiatan Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan**

**Pagu anggaran:** Sub kegiatan Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan Rp. 9.044.640.000,- dengan realisasi anggaran Rp. 639.376.000,- (7,07%) dan sisa anggaran Rp. 8.405.264.000,-

**Realisasi kinerja** : Untuk sub kegiatan peningkatan SPAM jaringan perpipaan di kawasan perkotaan realisasi capaian kinerja sebesar 5,24% ini merupakan realisasi dari peningkatan kapasitas SPAM IKK/perkotaan atau SPAM tematik tertentu sebesar 262 liter/detik.

##### **Sub kegiatan Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan (DAK)**

**Pagu anggaran** : sub kegiatan Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan (DAK) Rp. 7.383.053.000- dengan realisasi anggaran Rp. 0,- (0,00%) dan sisa anggaran sebesar Rp. 7.383.053.000,-

**Realisasi kinerja** : Untuk sub kegiatan perluasan SPAM jaringan perpipaan di kawasan perdesaan (DAK) realisasi capaian kinerja sebesar 0,00% karena masih proses perencanaan.

**4. PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL (DAK)**

**a. Kegiatan Pengembangan system dan pengelolaan persampahan di daerah Kabupaten/Kota**

**Sub Kegiatan Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS**

**Pagu anggaran :** Rp. 1.924.500.000,- dengan realisasi anggaran Rp. 0,- (0,00%) dan sisa anggaran sebesar Rp. 1.924.500.000,-

**Realisasi Kinerja :** Sub kegiatan Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS realiasi capaian kinerja sebesar 0,00% karena masih dalam proses perencanaan.

**5. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**

**a. Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota**

**Sub Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota**

**Sub Kegiatan Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat**

**Pagu anggaran :** **Sub** Kegiatan Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat Rp. 12.322.826.000,- dengan realisasi anggaran Rp. 524.334.000,- (4,25%) dan sisa anggaran sebesar Rp. 11.798.492.000,-

**Realisasi kinerja :** Untuk sub kegiatan pembangunan/penyediaan sub sistem pengolahan setempat realisasi capaian kinerja sebesar 3,60% ini terdiri dari 18 rumah tangga yang dibangun tangki septik.

**Sub kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik**

**Pagu anggaran :** Sub kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Rp. 304.522.200,- dengan

realisasi anggaran Rp. 67.584.500,- (22,19%) dan sisa anggaran sebesar Rp. 236.937.700,-

**Realisasi kinerja** : Untuk sub kegiatan operasi dan pemeliharaan sistem pengelolaan air limbah domestik realisasi capaian kinerja sebesar 0,00% karena masih dalam proses persiapan pelaksanaan pekerjaan.

## **6. PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**

### **a. Kegiatan Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung**

**Sub Kegiatan Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota**

**Pagu anggaran** : Sub Kegiatan Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota Rp.46.766.728.200,- dengan realisasi anggaran Rp. 4.631.596.280,- (9,90%) dan sisa anggaran sebesar Rp. 42.135.131.920,-

**Realisasi kinerja** : Untuk sub kegiatan perencanaan, pembangunan, pengawasan, dan pemanfaatan bangunan gedung daerah Kabupaten/Kota realisasi capaian kinerja sebesar 27,27% ini merupakan realisasi dari sebanyak 6 dokumen perencanaan yang sudah selesai.

**Sub kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota**

**Pagu anggaran** : sub kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota Rp. 439.896.400,- dengan realisasi anggaran Rp. 167.391.000,- (38,05%) dan sisa anggaran sebesar Rp. 272.505.400,-

**Realisasi kinerja** : Untuk sub kegiatan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan bangunan gedung Negara daerah kabupaten/kota

realisasi capaian kinerja sebesar 50,00% ini merupakan realisasi dari 6 dokumen monitoring dan evaluasi penyelenggaraan bangunan Gedung negara daerah Kabupaten/Kota.

**Sub kegiatan Rehabilitasi, Renovasi dan ubah suai bangunan gedung untuk kepentingan strategis daerah kabupaten/kota**

**Pagu anggaran :** Sub kegiatan rehabilitasi, renovasi dan ubah suai bangunan gedung untuk kepentingan strategis daerah kabupaten/kota Rp. 48.458.862.000,- dengan realisasi anggaran Rp. 4.821.226.599,- (9,95%) dan sisa anggaran sebesar Rp. 43.637.635.401,-

**Realisasi kinerja :** Untuk sub kegiatan rehabilitasi, renovasi dan ubah suai bangunan gedung untuk kepentingan strategis daerah kabupaten/kota realisasi capaian kinerja sebesar 19,05% ini merupakan realisasi sebanyak 4 buah yang sudah selesai dilaksanakan rehabilitasi terhadap bangunan Gedung milik negara.

**7. PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA**

**a. Kegiatan penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungannya di daerah Kabupaten/Kota**

**Sub Kegiatan Penataan bangunan dan lingkungan**

**Pagu anggaran :** Sub kegiatan penataan bangunan dan lingkungan Rp.26.102.635.100 ,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.1.148.911.950,- (4,40%) dan sisa anggaran sebesar Rp. 24.953.723.150,-

**Realisasi kinerja :** Untuk sub kegiatan penataan bangunan dan lingkungan realisasi capaian kinerja sebesar 16,67% ini merupakan realisasi sebanyak 1 buah bangunan yang telah selesai ditata.

## 8. PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN

### a. Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota

#### Sub kegiatan Rekonstruksi Jalan

**Pagu anggaran** : Sub kegiatan Rekonstruksi Jalan Rp. 162.981.342.450,- dengan realisasi anggaran Rp. 8.005.129.400,- (4,91%) dan sisa anggaran sebesar Rp. 154.976.213.050,-

**Realisasi kinerja** : Untuk sub kegiatan rekonstruksi jalan realisasi capaian kinerja sebesar 0,00% karena masih dalam proses pekerjaan fisik dan kontrak pekerjaan juga berakhir di bulan Desember.

#### Sub kegiatan Rehabilitasi Jalan

**Pagu anggaran** : Sub kegiatan Rehabilitasi Jalan Rp. 1.631.690.000,- dengan realisasi anggaran Rp. 9.679.000,-(0,59%) dan sisa anggaran sebesar Rp. 1.622.011.000,-

**Realisasi kinerja** : Untuk sub kegiatan rehabilitasi jalan realisasi capaian kinerja sebesar 0,00% karena masih dalam proses perencanaan.

#### Sub kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan

**Pagu anggaran** : Sub kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan Rp. 2.840.766.000,- dengan realisasi anggaran Rp. 197.817.000,- (6,96%) dan sisa anggaran sebesar Rp. 2.642.949.000,-

**Realisasi kinerja** : Untuk sub kegiatan pemeliharaan rutin jalan realisasi capaian kinerja sebesar 0,00% karena masih dalam proses survey lokasi yang akan dilaksanakan pemeliharaan rutin.

#### Sub Kegiatan Pembangunan Jembatan

**Pagu anggaran** : Sub kegiatan Pembangunan Jembatan Rp. 30.650.750.000,- dengan realisasi anggaran Rp. 1.217.311.419,- (3,97%) dan sisa anggaran sebesar Rp. 29.433.438.581,-

**Realisasi kinerja** : Untuk sub kegiatan pembangunan jembatan realisasi capaian kinerja sebesar 4,00% ini merupakan realisasi sebanyak 16 meter Panjang jembatan yang dibangun.

### **Sub Kegiatan Rehabilitasi Jembatan**

**Pagu anggaran :** Sub kegiatan rehabilitasi jembatan Rp. 8.657.200.000,- dengan realiasi anggaran Rp. 19.646.000,- (0,23%) dan sisa anggaran sebesar Rp. 8.637.554.000,-

**Realisasi Kinerja :** Untuk sub kegiatan rehabilitasi jembatan realisasi capaian kinerja sebesar 0,00% karena masih dalam prsoses perencanaan.

### **Sub kegiatan Pemeliharaan rutin jembatan**

**Pagu anggaran :** Sub kegiatan Pemeliharaan rutin jembatan Rp. 1.352.407.500,- dengan realisasi anggaran Rp. 0,- (0,00%) dan sisa anggaran sebesar Rp. 1.352.407.500,-

**Realisasi kinerja :** Untuk sub kegiatan pemeliharaan rutin jembatan realisasi capaian kinerja sebesar 0,00% karena masih dalam proses survey lokasi mana yang akan dilaksanakan pemeliharaan rutin jembatan.

## **9. PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**

### **a. Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi**

#### **Sub kegiatan Fasilitas Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi**

**Pagu anggaran :** Sub kegiatan Fasilitas Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi Rp. 584.167.000,- dengan raelisasi anggaran Rp. 0,-(0,00%) dan sisa anggaran sebesar Rp. 584.167.000,-

**Realisasi kinerja :** Untuk sub kegiatan fasilitas sertifikasi tenaga terampil konstruksi realisasi capaian kinerja sebesar 0% ini karena masih dalam proses persiapan pelaksanaan pekerjaan.

### **b. Pengembangan system informasi jasa konstruksi cakupan daerah Kabupaten/Kota**

**Pagu anggaran :** Sub Kegiatan pengelolaan operasional layanan informasi jasa konstruksi Rp. 140.069.000,- dengan realisasi anggaran Rp.0,- (0,00%) dan sisa anggaran sebesar Rp. 140.069.000,-

**Realisasi kinerja** : Untuk sub kegiatan dukungan/fasilitasi penyelenggaraan penerbitan rekomendasi teknis IUJK nasional realisasi capaian kinerja sebesar 0,00% karena masih dalam proses persiapan pelaksanaan pekerjaan.

**c. Pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi**

**Sub Kegiatan Pengawasan dan evaluasi tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi**

**Pagu anggaran** : Sub Kegiatan pengawasan dan evaluasi tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertub pemanfaatan jasa konstruksi Rp. 4.170.760.000,- dengan realisasi anggaran Rp.1.926.996.200,- (46,20%) dan sisa anggaran sebesar Rp. 2.243.763.800,-

**Realisasi kinerja** : Untuk sub kegiatan pengawasan dan evaluasi tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertub pemanfaatan jasa konstruksi realisasi capaian kinerja sebesar 0,00% karena masih dalam proses persiapan pelaksanaan pekerjaan.

**10. PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**

**a. Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota**

**Sub kegiatan Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota**

**Pagu anggaran** : Sub kegiatan Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota Rp. 752.428.100,- dengan realisasi anggaran Rp. 49.203.900 ,-(6,54%) dan sisa anggaran sebesar Rp. 703.224.200,-

**Realisasi kinerja** : Untuk sub kegiatan pelaksanaan persetujuan substansi, evaluasi, konsultasi evaluasi dan penetapan RTRW kabupaten/kota realisasi capaian kinerja sebesar 0,00% karena masih proses perencanaan pekerjaan.



**b. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota**

**Sub kegiatan Sistem Informasi Penataan Ruang**

**Pagu anggaran :** Sub kegiatan Sistem Informasi Penataan Ruang Rp. 419.557.800,- dengan realisasi anggaran Rp. 100.150.038,- (23,87%) dan sisa anggaran sebesar Rp. 319.407.762,-

**Realisasi kinerja :** Untuk sub kegiatan sistem informasi penataan ruang realisasi capaian kinerja sebesar 0,00% karena masih dalam proses perencanaan pekerjaan.

**c. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota**

**Sub kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang**

**Pagu anggaran :** Sub kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang Rp. 572.760.000,- dengan realisasi anggaran Rp. 61.446.862,- (10,73%) dan sisa anggaran sebesar Rp. 511.313.138,-

**Realisasi kinerja :** Untuk sub kegiatan koordinasi pelaksanaan penataan ruang realisasi capaian kinerja sebesar 0,00% karena masih dalam proses perencanaan.

**11. PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**

**a. Pendataan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten/kota**

**Sub kegiatan identifikasi perumahan di lokasi rawan bencana atau terkena relokasi program kabupaten/kota**

**Pagu anggaran :** Sub kegiatan identifikasi perumahan di lokasi rawan bencana atau terkena relokasi program kabupaten/kota Rp. 225.949.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 25.800.000,- (11,42%) dan sisa anggaran sebesar Rp. 200.149.000,-

**Realisasi kinerja :** Untuk sub kegiatan identifikasi perumahan di lokasi rawan bencana atau terkena relokasi program

kabupaten/kota realisasi capaian kinerja sebesar 0,00% karena masih dalam proses perencanaan pekerjaan.

**b. Pembangunan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten/kota**

**Sub kegiatan Rehabilitasi rumah bagi korban bencana**

**Pagu anggaran :** Sub kegiatan rehabilitasi rumah bagi korban bencana Rp. 193.156.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 105.240.000,- (54,48%) dan sisa anggaran sebesar Rp.87.916.000,-

**Realisasi kinerja :** Untuk sub kegiatan rehabilitasi rumah bagi korban bencana realisasi capaian kinerja sebesar 100,00% ini merupakan realisasi sebanyak 5 unit rumah yang dilakukan rehabilitasi.

**Sub kegiatan Pembangunan rumah bagi korban bencana**

**Pagu anggaran :** Sub kegiatan pembangunan rumah bagi korban bencana Rp. 175.589.600,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 110.292.500,- (62,81%) dan sisa anggaran sebesar Rp. 65.297.100,-

**Realisasi kinerja :** Untuk sub kegiatan pembangunan rumah bagi korban bencana realisasi capaian kinerja sebesar 100,00% ini merupakan realisasi sebanyak 3 unit rumah yang dilakukan Pembangunan rumah.

**12. PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**

**a. Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha**

**Sub kegiatan Penyusunan rencana pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh**

**Pagu anggaran :** Sub kegiatan penyusunan rencana pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh Rp. 620.320.400,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.

18.525.000,- (2,99%) dan sisa anggaran sebesar Rp. 601.795.400,-

**Realisasi kinerja** : Untuk sub kegiatan penyusunan rencana pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh realisasi capaian kinerja sebesar 0,00% karena masih dalam proses perencanaan pekerjaan.

**b. Peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha**

**Sub kegiatan kerjasama perbaikan rumah tidak layak huni beserta PSU**

**Pagu anggaran** : Sub kegiatan kerjasama perbaikan rumah tidak layak huni beserta PSU Rp. 3.956.730.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 76.137.000,- (1,92%) dan sisa anggaran sebesar Rp. 3.880.593.000,-

**Realisasi kinerja** : Untuk sub kegiatan kerjasama perbaikan rumah tidak layak huni beserta PSU realisasi capaian kinerja sebesar 25,00% ini merupakan realisasi sebanyak 4 dokumen kesepakatan Kerjasama dalam perbaikan rumah tidak layak huni beserta PSU.

**13. PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH**

**a. Pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh pada daerah kabupaten/kota**

**Sub kegiatan Perbaikan rumah tidak layak huni untuk pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh di luar kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha**

**Pagu anggaran** : Sub kegiatan perbaikan rumah tidak layak huni untuk pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh di luar kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha Rp. 5.652.057.800,- dengan

realisasi anggaran sebesar Rp. 1.225.000,- (0.02%) dan sisa anggaran sebesar Rp. 5.650.832.800,-

**Realisasi kinerja** : Untuk sub kegiatan perbaikan rumah tidak layak huni untuk pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh di luar kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha realisasi capaian kinerja sebesar 0,00% karena masih dalam proses perencanaan.

**14. PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**

**a. Urusan penyelenggaraan PSU perumahan**

**Sub kegiatan Perencanaan penyediaan PSU perumahan**

**Pagu anggaran** : Sub kegiatan perencanaan penyediaan PSU perumahan Rp. 362.520.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 49.496.000,- (13,65%) dan sisa anggaran sebesar Rp. 313.024.000,-

**Realisasi kinerja** : Untuk sub kegiatan perencanaan penyediaan PSU perumahan realisasi capaian kinerja sebesar 0,00% karena masih dalam proses perencanaan pekerjaan.

**Sub kegiatan Penyediaan prasarana, sarana dan utilitas umum diperumahan untuk menunjang fungsi hunian**

**Pagu anggaran** : Sub kegiatan penyediaan prasarana, sarana dan utilitas umum di perumahan untuk menunjang fungsi hunian Rp. 78.472.013.700,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.152.302.700,- (1,47%) dan sisa anggaran sebesar Rp. 77.319.711.000,-

**Realisasi kinerja** : Untuk sub kegiatan penyediaan prasarana, sarana dan utilitas umum di perumahan untuk menunjang fungsi hunian realisasi capaian kinerja sebesar 25,00% ini merupakan realiasi sebanyak 2 lokasi perumahan yang dilakukan pekerjaannya.

**BAB III**  
**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PEKERJAAN UMUM,  
PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN  
PERMUKIMAN TAHUN 2023**

**3.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas PUPRPERKIM perubahan  
Tahun 2023**

Adapun program kegiatan serta sub kegiatan pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman tersebut adalah sebagai berikut :

**1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH  
KABUPATEN/KOTA**

**Kegiatan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja  
perangkat daerah**

Sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan anggaran sebelum perubahan Rp.71.750.000,- dan setelah perubahan terjadi penambahan sebanyak Rp.24.498.000,-

Sub kegiatan koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dengan anggaran sebelum perubahan Rp.32.890.000,- dan setelah perubahan terjadi penambahan sebanyak Rp.60.146.000,-

**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**

Sub kegiatan Penyediaan gaji dan tunjangan ASN dengan anggaran sebelum perubahan Rp.10.059.476.951,- dan setelah perubahan terjadi pengurangan sebanyak Rp.63.566.840,-

Sub kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD dengan anggaran sebelum perubahan Rp.19.174.916,- dan setelah perubahan terjadi penambahan sebanyak 1.326.996,-

Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dengan anggaran sebelum perubahan Rp.628.620.000,- dan setelah perubahan terjadi penambahan sebanyak Rp.13.900.000,-

**Kegiatan Administrasi kepegawaian perangkat daerah**

Sub Kegiatan pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya dengan anggaran sebelum perubahan Rp.68.250.000,- dan setelah perubahan terjadi pengurangan sebanyak Rp.9.750.000,-

Sub kegiatan bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan dengan anggaran sebelum perubahan Rp.505.899.000,- dan setelah perubahan terjadi penambahan sebanyak Rp.30.000.000,-

**Kegiatan Administrasi umum perangkat daerah**

Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan anggaran sebelum perubahan Rp.245.304.000,- dan setelah perubahan terjadi penambahan sebanyak Rp.350.323.600,-

Sub kegiatan 'Penyediaan Bahan Logistik Kantor dengan anggaran sebelum perubahan Rp.135.560.000,- dan setelah perubahan terjadi penambahan sebanyak Rp.29.200.000,-

Sub kegiatan 'Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan dengan anggaran sebelum perubahan Rp.500.558.500,- dan setelah perubahan tidak terjadi penambahan maupun perubahan.

Sub kegiatan 'Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan dengan anggaran sebelum perubahan Rp.24.400.000,- dan setelah perubahan tidak terjadi penambahan maupun perubahan.

Sub kegiatan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD dengan anggaran sebelum perubahan Rp.1.035.820.000,- dan setelah perubahan terjadi penambahan sebanyak Rp.47.676.000,-

**Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**

Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan anggaran sebelum perubahan Rp.550.000.000,- dan setelah perubahan tidak terjadi penambahan maupun perubahan.

Sub Kegiatan Pengadaan Alat Besar dengan anggaran sebelum perubahan Rp.4.650.000.000,- dan setelah perubahan tidak terjadi penambahan maupun perubahan.

Sub Kegiatan Pengadaan Mebel dengan anggaran sebelum perubahan Rp. 0,- dan setelah perubahan terjadi penambahan sebanyak Rp.319.083.900,-

**Kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**

Sub kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dengan anggaran sebelum perubahan Rp.678.000.000,- dan setelah perubahan terjadi pengurangan sebanyak Rp.58.270.000,-

Sub kegiatan penyediaan jasa pelayanan umum kantor dengan anggaran sebelum perubahan Rp.1.228.362.100,- dan setelah perubahan terjadi penambahan sebanyak Rp.33.894.800,-

**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan dengan anggaran sebelum perubahan Rp.650.777.450,- dan setelah perubahan terjadi penambahan sebanyak Rp.3.480.000,-

Sub Kegiatan Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya dengan anggaran sebelum perubahan Rp.142.467.500,- dan setelah perubahan tidak terjadi penambahan maupun perubahan.

Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya dengan anggaran sebelum perubahan Rp.1.356.015.750,- dan setelah perubahan terjadi pengurangan sebanyak Rp.274.333.450,-

## **2. PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**

### **Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**

Sub kegiatan Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya dengan anggaran sebelum perubahan Rp.3.440.190.000,- dan setelah perubahan terjadi penambahan sebanyak Rp.1.470.060.000,-

Sub kegiatan Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing dengan anggaran sebelum perubahan Rp.20.620.707.100,- dan setelah perubahan terjadi penambahan sebanyak Rp.6.142.080.900,-

Sub kegiatan Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir dengan anggaran sebelum perubahan Rp.1.155.120.000,- dan setelah perubahan tidak terjadi penambahan maupun perubahan.

Sub kegiatan 'Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota dengan anggaran sebelum perubahan Rp.276.640.800,- dan setelah perubahan terjadi pengurangan sebanyak Rp.146.751.600,-

### **Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**

Sub kegiatan Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan dengan anggaran sebelum perubahan Rp.4.285.110.000,- dan setelah perubahan terjadi penambahan sebanyak Rp.2.706.480.000,-

Sub kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan dengan anggaran sebelum perubahan Rp.2.654.181.300,- dan setelah perubahan terjadi penambahan sebanyak Rp.2.571.158.400,-

Sub kegiatan Rehabilitasi jaringan irigasi permukaan dengan anggaran sebelum perubahan Rp.4.136.020.000,- dan setelah perubahan terjadi penambahan sebanyak Rp.1.581.960.000,-



**3. 'PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**

**Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota**

Sub kegiatan Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan dengan anggaran sebelum perubahan Rp.9.044.640.000,- dan setelah perubahan terjadi penambahan sebanyak Rp.387.110.000,- Sub kegiatan Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Pedesaan dengan anggaran sebelum perubahan Rp.7.383.053.000,- dan setelah perubahan tidak terjadi penambahan maupun pengurangan.

**4. 'PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL**

**Kegiatan Pengembangan system dan pengelolaan persampahan di Daerah Kabupaten/Kota**

Sub Kegiatan Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS dengan anggaran sebelum perubahan Rp.1.924.500.000,- dan setelah perubahan tidak terjadi penambahan maupun pengurangan.

**5. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**

**Kegiatan 'Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota**

Sub Kegiatan Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat dengan anggaran sebelum perubahan Rp.12.322.826.000,- dan setelah perubahan terjadi penambahan sebanyak Rp.389.960.000,- Sub Kegiatan Operasional dan Pemeliharaan sistem Pengelolaan Air limbah Domestik dengan anggaran sebelum perubahan Rp.304.522.200,- dan setelah perubahan terjadi penambahan sebanyak Rp. 54.220.200,-

**6. 'PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**

**Kegiatan 'Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung**

Sub Kegiatan Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota dengan anggaran sebelum perubahan Rp.46.766.728.200,- dan setelah perubahan terjadi penambahan sebanyak Rp.3.433.416.400,-

Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota dengan anggaran sebelum perubahan Rp.439.896.400,- dan setelah perubahan terjadi penambahan sebanyak Rp.74.404.000,-

Sub Kegiatan Rehabilitasi, Renovasi dan ubah suai Bangunan Gedung untuk kepentingan strategis Daerah Kabupaten/Kota dengan anggaran sebelum perubahan Rp.48.458.862.000,- dan setelah perubahan terjadi penambahan sebanyak Rp.796.240.000,-

**7. 'PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA**

**Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota**

Sub kegiatan Penataan Bangunan dan lingkungan dengan anggaran sebelum perubahan Rp.26.102.635.100,- dan setelah perubahan terjadi penambahan sebanyak Rp.2.295.130.000,-

**8. PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**

**Kegiatan 'Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota**

Sub Kegiatan Rekonstruksi Jalan dengan anggaran sebelum perubahan Rp.162.981.342.450,- dan setelah perubahan terjadi penambahan sebanyak Rp.8.176.140.000,-

Sub Kegiatan Rehabilitasi Jalan dengan anggaran sebelum perubahan Rp.1.631.690.000,- dan setelah perubahan terjadi pengurangan sebanyak Rp. 193.700.000,-

Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan dengan anggaran sebelum perubahan Rp.2.840.766.000,- dan setelah perubahan terjadi pengurangan sebanyak Rp.1.440.700.000,-

Sub Kegiatan Pembangunan Jembatan dengan anggaran sebelum perubahan Rp.30.650.750.000,- dan setelah perubahan terjadi penambahan sebanyak Rp.1.935.180.000,-

Sub Kegiatan Rehabilitasi Jembatan dengan anggaran sebelum perubahan Rp.8.657.200.000,- dan setelah perubahan terjadi penambahan sebanyak Rp.536.980.000,-

Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jembatan dengan anggaran sebelum perubahan Rp.1.352.407.500,- dan setelah perubahan terjadi pengurangan sebanyak Rp.1.100.000.000,-

## **9. 'PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**

### **Kegiatan 'Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi**

Sub Kegiatan Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi dengan anggaran sebelum perubahan Rp.584.167.000,- dan setelah perubahan tidak terjadi penambahan dan pengurangan.

### **Kegiatan Penyelenggaraan system informasi jasa konstruksi cakupan daerah Kabupaten/Kota**

Sub Kegiatan Pengelolaan operasional layanan informasi jasa konstruksi dengan anggaran sebelum perubahan Rp.140.069.000,- dan setelah perubahan tidak terjadi penambahan maupun pengurangan.

### **Kegiatan Pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi.**

Sub Kegiatan Pengawasan dan evaluasi tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi dengan anggaran sebelum perubahan Rp.4.170.760.000,- dan setelah perubahan terjadi penambahan sebanyak Rp.47.700.000,-

## **10. 'PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**

### **Kegiatan 'Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota**

Sub Kegiatan Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota dengan anggaran sebelum perubahan Rp.752.428.100,- dan setelah perubahan terjadi penambahan sebanyak Rp.199.941.700,-

### **Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota**

Sub Kegiatan Sistem Informasi Penataan Ruang dengan anggaran sebelum perubahan Rp.419.557.800,- dan setelah perubahan terjadi penambahan sebanyak Rp.41.731.800,-

### **Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota**

Sub kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang dengan anggaran sebelum perubahan Rp.572.760.000,- dan setelah perubahan terjadi penambahan sebanyak Rp.48.219.800,-

## **11. 'PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**

### **Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/ Kota**

Sub Kegiatan Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota dengan anggaran sebelum perubahan Rp. 225.949.000,- dan setelah perubahan terjadi pengurangan sebanyak Rp.13.870.000,-

### **Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota**

Sub kegiatan Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana dengan anggaran sebelum perubahan Rp.193.156.000,- dan setelah perubahan terjadi pengurangan sebanyak Rp.31.726.000,-

Sub kegiatan Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana dengan anggaran sebelum perubahan Rp.175.589.600,- dan setelah perubahan tidak terjadi penambahan maupun pengurangan

## **12. 'PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**

### **Kegiatan 'Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha**

Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh dengan anggaran sebelum perubahan Rp.620.320.400,- dan setelah perubahan terjadi penambahan sebanyak Rp.8.570.000,-

### **Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha**

Sub kegiatan Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU dengan anggaran sebelum perubahan Rp.3.956.730.000,- dan setelah perubahan terjadi penambahan sebanyak Rp.18.089.500,-

## **13. 'PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH**

### **Kegiatan Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota**

Sub kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha Dengan anggaran sebelum perubahan Rp.5.652.057.800,- dan setelah perubahan terjadi penambahan sebanyak Rp.60.429.900,-

## **14. PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**

### **Kegiatan 'Urusan Penyelenggaraan PSU**

Sub kegiatan Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan dengan anggaran sebelum perubahan Rp.362.520.000,- dan setelah perubahan terjadi penambahan sebanyak Rp.108.730.000,-

Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana , dan Utilitas Umum di Perumahan Untuk Menunjang Fungsi Hunian dengan anggaran

sebelum perubahan Rp.78.472.013.700,- dan setelah perubahan terjadi penambahan sebanyak Rp.24.813.489.900,-

### **3.2. Analisis Sosial Ekonomi**

Dalam dokumen perencanaan Renstra, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Balangan memiliki tujuan dan sasaran “ Meningkatnya sarana dan prasarana infrastruktur public dan Meningkatnya sarana dan prasarana infrastruktur permukiman “ dimana didalam mewujudkan tujuan dan sasaran tersebut Dinas PUPRPERKIM menggunakan beberapa program diantaranya program Perumahan dan kawasan permukiman kumuh dan Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah serta Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum yang mana ketiga program itu sasaran langsung untuk penanggulangan kemiskinan yang ada di Kabupaten Balangan. Untuk program Perumahan dan kawasan permukiman kumuh sasaran nya adalah masyarakat yang berpenghasilan rendah, yang dilakukan Dinas PUPRPERKIM didalam program itu adalah bantuan rehabilitasi dan pembangunan rumah tidak layak huni yang ada di Kabupaten Balangan.

Sedangkan untuk program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah yang dilakukan Dinas PUPRPERKIM dalam rangka mengurangi angka kemiskinan yang ada di Kabupaten Balangan yaitu dengan membangun prasarana sanitasi untuk masyarakat berpenghasilan rendah sedangkan untuk program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum yang dilakukan Dinas PUPRERKIM adalah melakukan penambahan sambungan rumah untuk ketersediaan air bersih untuk masyarakat berpenghasilan rendah.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Evaluasi Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Balangan sampai dengan triwulan II tahun 2023 dilaksanakan sebagai amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah dan mulai mengacu pada Permendagri Nomor 54 Tahun 2010.

Evaluasi yang dilaksanakan adalah terhadap pelaksanaan Rencana Kerja sampai dengan triwulan II tahun 2023 berdasarkan rencana target yang terdapat dalam Rencana Kerja Tahun 2023 secara berkesinambungan maka format penyusunan Perubahan Rencana Kerja disusun sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010.

Dari hasil evaluasi pencapaian kinerja program dan kegiatan telah dicapai sampai dengan triwulan II tahun 2023. Untuk itu perlu kerja keras kembali untuk pencapaian target pada tahun 2023 ini sebagai mana telah ditargetkan pada Renstra Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026 dalam rangka menunjang tercapainya Visi dan Misi Bupati Balangan serta target dan sasaran pembangunan yang terdapat dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Perubahan Pemerintah Kabupaten Balangan tahun 2023.

Dengan adanya Perubahan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Balangan Tahun 2023, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari visi dan misi Perangkat Daerah diharapkan akan lebih terakomodasi, terintergrasi dan sinergi serta berkelanjutan dengan sesama Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Balangan maupun dengan Perangkat Daerah yang membidangi fungsi lain.

**Paringin, Agustus 2023**  
**Kepala Dinas Pekerjaan Umum,**  
**Penataan Ruang, Perumahan**  
**Rakyat dan Kawasan Permukiman**  
**Kabupaten Balangan**



**RAHMADIAH,ST,MT**  
**NIP. 19760309 200604 2 007**



RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) SKPD TAHUN ANGGARAN 2023  
KABUPATEN BALANGAN

Nama SKPD : Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman  
 Jumlah Program : 13  
 Jumlah Kegiatan : 28  
 Jumlah Sub Kegiatan : 56  
 Pagu Total Sebelum Perubahan : 516.311.192.617  
 Pagu Total Setelah Perubahan : 572.082.979.723

0

Kode	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023													SKPD Penanggung jawab	
				Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana			
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan		1/2/3
(1)	(2)	(4)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)=12-11	(14)	(15)	(16)	
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										516,311,192,617	572,082,979,723.00	55,771,787,106.00			
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG										426,652,856,117	457,460,929,923	30,808,073,806	DAK dan APBD II	DAK dan APBD II	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Sakip SKPD	Nilai Sakip SKPD	Dinas PUPRPERKIM	Dinas PUPRPERKIM	Dinas PUPRPERKIM	Dinas PUPRPERKIM	66	66	22,583,326,167	23,090,935,173	507,609,006	ABPD II	ABPD II		
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja	Dinas PUPRPERKIM	Dinas PUPRPERKIM	Dinas PUPRPERKIM	Dinas PUPRPERKIM	2 dok	2 dok	104,640,000	189,284,000	84,644,000	ABPD II	ABPD II		
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Dinas PUPRPERKIM	Dinas PUPRPERKIM	Dinas PUPRPERKIM	Dinas PUPRPERKIM	2 dok	2 dok	71,750,000	96,248,000	24,498,000	ABPD II	ABPD II		
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Dinas PUPRPERKIM	Dinas PUPRPERKIM	Dinas PUPRPERKIM	Dinas PUPRPERKIM	2 dok	2 dok	32,890,000	93,036,000	60,146,000	ABPD II	ABPD II		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Pembayaran Gaji PNS dan Laporan Keuangan	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Pembayaran Gaji PNS dan Laporan Keuangan	ASN Dinas PUPRPERKIM	ASN Dinas PUPRPERKIM	ASN Dinas PUPRPERKIM	ASN Dinas PUPRPERKIM	14 bulan	14 bulan	10,707,271,867	10,658,932,023	-48,339,844	ABPD II	ABPD II		
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Pegawai Dinas PUPRPERKIM	Pegawai Dinas PUPRPERKIM	Pegawai Dinas PUPRPERKIM	Pegawai Dinas PUPRPERKIM	64 orang	64 orang	10,059,476,951	9,995,910,111	-63,566,840	ABPD II	ABPD II		
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Dinas PUPRPERKIM	Dinas PUPRPERKIM	Dinas PUPRPERKIM	Dinas PUPRPERKIM	12 dok	12 dok	19,174,916	20,501,912	1,326,996	ABPD II	ABPD II		
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Dinas PUPRPERKIM	Dinas PUPRPERKIM	Dinas PUPRPERKIM	Dinas PUPRPERKIM	3 laporan	3 laporan	628,620,000	642,520,000	13,900,000	ABPD II	ABPD II		
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan disiplin aparatur	Persentase Peningkatan disiplin aparatur	Pegawai Dinas PUPRPERKIM	Pegawai Dinas PUPRPERKIM	Pegawai Dinas PUPRPERKIM	Pegawai Dinas PUPRPERKIM	1	1	574,149,000	594,399,000	20,250,000	ABPD II	ABPD II		

	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian Dinas beserta Atribut kelengkapan	Jumlah paket pakaian Dinas beserta Atribut kelengkapan	ASN Dinas PUPRPERKIM	ASN Dinas PUPRPERKIM	ASN Dinas PUPRPERKIM	ASN Dinas PUPRPERKIM	195 lembar	180 lembar	68,250,000	58,500,000	-9,750,000	ABPD II	ABPD II
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah orang yang mengikuti Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Dinas PUPRPERKIM	Dinas PUPRPERKIM	Dinas PUPRPERKIM	Dinas PUPRPERKIM	60 orang	76 orang	505,899,000	535,899,000	30,000,000	ABPD II	ABPD II
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Administrasi umum perangkat daerah yang dilaksanakan</b>	<b>Persentase Administrasi umum perangkat daerah yang dilaksanakan</b>	<b>Dinas PUPRPERKIM</b>	<b>Dinas PUPRPERKIM</b>	<b>Dinas PUPRPERKIM</b>	<b>Dinas PUPRPERKIM</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1,941,642,500</b>	<b>2,368,842,100</b>	<b>427,199,600</b>	<b>ABPD II</b>	<b>ABPD II</b>
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Dinas PUPRPERKIM	Dinas PUPRPERKIM	Dinas PUPRPERKIM	Dinas PUPRPERKIM	9 paket	15 paket	245,304,000	595,627,600	350,323,600	ABPD II	ABPD II
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Dinas PUPRPERKIM	Dinas PUPRPERKIM	Dinas PUPRPERKIM	Dinas PUPRPERKIM	600 paket	600 paket	135,560,000	164,760,000	29,200,000	ABPD II	ABPD II
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Dinas PUPRPERKIM	Dinas PUPRPERKIM	Dinas PUPRPERKIM	Dinas PUPRPERKIM	1 paket	1 paket	500,558,500	500,558,500		ABPD II	ABPD II
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dinas PUPRPERKIM	Dinas PUPRPERKIM	Dinas PUPRPERKIM	Dinas PUPRPERKIM	12 dok	12 dok	24,400,000	24,400,000		ABPD II	ABPD II
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Dinas PUPRPERKIM	Dinas PUPRPERKIM	Dinas PUPRPERKIM	Dinas PUPRPERKIM	12 laporan	12 laporan	1,035,820,000	1,083,496,000	47,676,000	ABPD II	ABPD II
	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan administrasi pelayanan SOPD dan Persentase pemenuhan sarana dan prasarana SOPD</b>	<b>Persentase pemenuhan administrasi pelayanan SOPD dan Persentase pemenuhan sarana dan prasarana SOPD</b>	<b>Dinas PUPRPERKIM</b>	<b>Dinas PUPRPERKIM</b>	<b>Dinas PUPRPERKIM</b>	<b>Dinas PUPRPERKIM</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>5,200,000,000</b>	<b>5,519,083,900</b>	<b>319,083,900</b>	<b>ABPD II</b>	<b>ABPD II</b>
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit kendaraan Dinas operasional atau lapangan yang disediakan	Jumlah unit kendaraan Dinas operasional atau lapangan yang disediakan	Dinas PUPRPERKIM	Dinas PUPRPERKIM	Dinas PUPRPERKIM	Dinas PUPRPERKIM	1 unit	1 unit	550,000,000	550,000,000		ABPD II	ABPD II
	Pengadaan Alat Besar	Jumlah unit alat besar yang disediakan	Jumlah unit alat besar yang disediakan	Dinas PUPRPERKIM	Dinas PUPRPERKIM	Dinas PUPRPERKIM	Dinas PUPRPERKIM	3 unit	3 unit	4,650,000,000	4,650,000,000		ABPD II	ABPD II
	Pengadaan Mebel		Jumlah paket mebel yang disediakan	Dinas PUPRPERKIM	Dinas PUPRPERKIM	Dinas PUPRPERKIM	Dinas PUPRPERKIM	0	4 paket		319,083,900	319,083,900	ABPD II	ABPD II
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan administrasi pelayanan, sarana dan prasarana SOPD</b>	<b>Persentase pemenuhan administrasi pelayanan, sarana dan prasarana SOPD</b>	<b>Dinas PUPRPERKIM</b>	<b>Dinas PUPRPERKIM</b>	<b>Dinas PUPRPERKIM</b>	<b>Dinas PUPRPERKIM</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>1,906,362,100</b>	<b>1,881,986,900</b>	<b>-24,375,200</b>	<b>ABPD II</b>	<b>ABPD II</b>
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Dinas PUPRPERKIM	Dinas PUPRPERKIM	Dinas PUPRPERKIM	Dinas PUPRPERKIM	12 laporan	12 laporan	678,000,000	619,730,000	-58,270,000	ABPD II	ABPD II
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Dinas PUPRPERKIM	Dinas PUPRPERKIM	Dinas PUPRPERKIM	Dinas PUPRPERKIM	12 laporan	12 laporan	1,228,362,100	1,262,256,900	33,894,800	ABPD II	ABPD II
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan Pemeliharaan sarana dan prasarana SOPD</b>	<b>Persentase pemenuhan Pemeliharaan sarana dan prasarana SOPD</b>	<b>Dinas PUPRPERKIM</b>	<b>Dinas PUPRPERKIM</b>	<b>Dinas PUPRPERKIM</b>	<b>Dinas PUPRPERKIM</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2,149,260,700</b>	<b>1,878,407,250</b>	<b>-270,853,450</b>		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Dinas PUPRPERKIM	Dinas PUPRPERKIM	Dinas PUPRPERKIM	Dinas PUPRPERKIM	8 unit	8 unit	650,777,450	654,257,450	3,480,000	ABPD II	ABPD II
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Dinas PUPRPERKIM	Dinas PUPRPERKIM	Dinas PUPRPERKIM	Dinas PUPRPERKIM	7 unit	7 unit	142,467,500	142,467,500		ABPD II	ABPD II
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Dinas PUPRPERKIM	Dinas PUPRPERKIM	Dinas PUPRPERKIM	Dinas PUPRPERKIM	2 unit	4 unit	1,356,015,750	1,081,682,300	-274,333,450	ABPD II	ABPD II
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)</b>	<b>Persentase luas jaringan daerah irigasi permukaan kewenangan daerah dalam kondisi mantap</b>	<b>Persentase jaringan irigasi yang berfungsi baik</b>	Kab.Balangan	Kab.Balangan	Kab.Balangan	Kab.Balangan	<b>28,31%</b>	<b>31,57%</b>	<b>36,567,969,200</b>	<b>51,186,460,100</b>	<b>14,618,490,900</b>	ABPD II	ABPD II
		<b>Persentase Panjang infrastruktur pengendali banjir wilayah sungai kewenangan daerah yang dibangun</b>												

	<b>Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Panjang infrastruktur pengendali banjir wilayah sungai kewenangan daerah yang dibangun</b>	<b>Persentase tebing rusak</b>	Kab.Balangan	Kab.Balangan	Kab.Balangan	Kab.Balangan	13,03%	14,68%	25,492,657,900	33,251,550,400	7,758,892,500	ABPD II	ABPD II
	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah embung dan penampung air lainnya yang dibangun	Jumlah embung dan penampung air lainnya yang dibangun	Kab.Balangan	Kab.Balangan	Kab.Balangan	Kab.Balangan	8 unit	19 unit	3,440,190,000	4,910,250,000	1,470,060,000	ABPD II	ABPD II
	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	Panjang bangunan perkuatan tebing yang dibangun	Panjang bangunan perkuatan tebing yang dibangun	Kab.Balangan	Kab.Balangan	Kab.Balangan	Kab.Balangan	120 meter	3420 meter	20,620,707,100	26,762,788,000	6,142,080,900	ABPD II	ABPD II
	Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Jumlah pintu air/bendung pengendali banjir yang direhabilitasi	Jumlah pintu air/bendung pengendali banjir yang direhabilitasi	Kab.Balangan	Kab.Balangan	Kab.Balangan	Kab.Balangan	5 unit	4 unit	1,155,120,000	1,155,120,000		ABPD II	ABPD II
	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah peserta yang mengikuti pembinaan dan pemberdayaan kelembagaan pengelolaan SDA kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah peserta yang mengikuti pembinaan dan pemberdayaan kelembagaan pengelolaan SDA kewenangan Kabupaten/Kota	Kab.Balangan	Kab.Balangan	Kab.Balangan	Kab.Balangan	50 orang	100 orang	276,640,800	423,392,400	146,751,600	ABPD II	ABPD II
	<b>Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Luas jaringan daerah irigasi permukaan kewenangan daerah yang direhabilitasi</b>	<b>Persentase saluran irigasi dalam kondisi baik</b>	Kab.Balangan	Kab.Balangan	Kab.Balangan	Kab.Balangan	28,31%	31,57%	11,075,311,300	17,934,909,700	6,859,598,400	ABPD II	ABPD II
	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang jaringan irigasi permukaan yang ditingkatkan	Panjang jaringan irigasi permukaan yang ditingkatkan	Kab.Balangan	Kab.Balangan	Kab.Balangan	Kab.Balangan	300 meter	3480 meter	4,285,110,000	6,991,590,000	2,706,480,000	ABPD II	ABPD II
	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang jaringan irigasi permukaan yang dioperasikan dan dipelihara	Panjang jaringan irigasi permukaan yang dioperasikan dan dipelihara	Kab.Balangan	Kab.Balangan	Kab.Balangan	Kab.Balangan	200 meter	1320 meter	2,654,181,300	5,225,339,700	2,571,158,400	ABPD II	ABPD II
	Rehabilitasi jaringan irigasi permukaan	Panjang jaringan irigasi permukaan yang direhabilitasi	Panjang jaringan irigasi permukaan yang direhabilitasi	Kab.Balangan	Kab.Balangan	Kab.Balangan	Kab.Balangan	100 meter	3420 meter	4,136,020,000	5,717,980,000	1,581,960,000	ABPD II	ABPD II
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM</b>	<b>Persentase Rumah Tangga yang dapat mengakses air bersih yang layak</b>	<b>Persentase rumah tangga yang terakses air bersih layak</b>	Masyarakat Balangan	Masyarakat Balangan	Masyarakat Balangan	Masyarakat Balangan	83,27%	86,89%	16,427,693,000	16,814,803,000	387,110,000	DAK dan APBD II	DAK dan APBD II
	<b>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Rumah Tangga yang dapat mengakses air bersih yang layak</b>	<b>Jumlah RT yang terhubung dengan air perpipaan</b>	Masyarakat Balangan	Masyarakat Balangan	Masyarakat Balangan	Masyarakat Balangan	100 RT	100 RT	16,427,693,000	16,814,803,000	387,110,000	DAK dan APBD II	DAK dan APBD II
	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Peningkatan kapasitas SPAM IKK/perkotaan atau SPAM tematik tertentu	Peningkatan kapasitas SPAM IKK/perkotaan atau SPAM tematik tertentu	Masyarakat Balangan	Masyarakat Balangan	Masyarakat Balangan	Masyarakat Balangan	5000 liter/detik	5000 liter/detik	9,044,640,000	9,431,750,000	387,110,000	ABPD II	ABPD II
	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah Penambahan sambungan rumah yang terlayani melalui Pemanfaatan Idle Capacity dengan penambahan jaringan	Jumlah Penambahan sambungan rumah yang terlayani melalui Pemanfaatan Idle Capacity dengan penambahan jaringan	Masyarakat Balangan	Masyarakat Balangan	Masyarakat Balangan	Masyarakat Balangan	1257 SR	1257 SR	7,383,053,000	7,383,053,000		DAK dan APBD II	DAK dan APBD II
	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL</b>	<b>Persentase pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan yang baik</b>	<b>Persentase pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan yang baik</b>	Kab.Balangan	Kab.Balangan	Kab.Balangan	Kab.Balangan	80%	80%	1,924,500,000	1,924,500,000			
	<b>Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase pembangunan bangunan persampahan</b>	<b>Persentase pembangunan bangunan persampahan</b>	Kab.Balangan	Kab.Balangan	Kab.Balangan	Kab.Balangan	75%	75%	1,924,500,000	1,924,500,000			
	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Kab.Balangan	Kab.Balangan	Kab.Balangan	Kab.Balangan	600 rumah tangga	600 rumah tangga	1,924,500,000	1,924,500,000			
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH</b>	<b>Persentase rumah tangga yang dapat mengakses air limbah domestik</b>	<b>Persentase rumah tangga yang terakses sanitasi layak</b>	Kab.Balangan	Kab.Balangan	Kab.Balangan	Kab.Balangan	93,76%	99,98%	12,627,348,200	13,071,528,400	444,180,200	DAK dan APBD II	DAK dan APBD II
	<b>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase rumah tangga yang dapat mengakses air limbah domestik yang layak</b>	<b>Persentase RT yang limbah domestik dikelola dengan baik</b>	Kab.Balangan	Kab.Balangan	Kab.Balangan	Kab.Balangan	93,76%	99,98%	12,627,348,200	13,071,528,400	444,180,200	DAK dan APBD II	DAK dan APBD II
	Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Jumlah rumah tangga yang memiliki tangki septik	Jumlah rumah tangga yang memiliki tangki septik	Kab.Balangan	Kab.Balangan	Kab.Balangan	Kab.Balangan	500 rumah tangga	501 rumah tangga	12,322,826,000	12,712,786,000	389,960,000	DAK dan APBD II	DAK dan APBD II

Dinas  
PUPRPERKIM

	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah unit sistem pengelolaan air limbah domestik yang dioperasikan dan dipelihara	Jumlah unit sistem pengelolaan air limbah domestik yang dioperasikan dan dipelihara	Kab.Balangan	Kab.Balangan	Kab.Balangan	Kab.Balangan	1 unit	1 unit	304,522,200	358,742,400	54,220,200	ABPD II	ABPD II
	<b>PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG</b>	<b>Persentase bangunan gedung/publik dalam kondisi baik</b>	<b>Persentase bangunan/gedung sesuai standart</b>	<b>Kab.Balangan</b>	<b>Kab.Balangan</b>	<b>Kab.Balangan</b>	<b>Kab.Balangan</b>	<b>89,60%</b>	<b>89,60%</b>	<b>95,665,486,600</b>	<b>99,969,547,000</b>	<b>4,304,060,400</b>	ABPD II	ABPD II
	<b>Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung</b>	<b>Jumlah Bangunan gedung yang dibangun dan dipelihara</b>	<b>Persentase bangunan/gedung publik dalam kondisi baik</b>	<b>Kab.Balangan</b>	<b>Kab.Balangan</b>	<b>Kab.Balangan</b>	<b>Kab.Balangan</b>	<b>22 buah</b>	<b>89,60%</b>	<b>95,665,486,600</b>	<b>99,969,547,000</b>	<b>4,304,060,400</b>	ABPD II	ABPD II
	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen perencanaan, pembangunan, pengawasan dan pemanfaatan bangunan gedung daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen perencanaan, pembangunan, pengawasan dan pemanfaatan bangunan gedung daerah Kabupaten/Kota	Kab.Balangan	Kab.Balangan	Kab.Balangan	Kab.Balangan	22 dok	140 dok	46,766,728,200	50,200,144,600	3,433,416,400	ABPD II	ABPD II
	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi penyelenggaraan bangunan gedung negara daerah kabupaten/kota	Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi penyelenggaraan bangunan gedung negara daerah kabupaten/kota	Kab.Balangan	Kab.Balangan	Kab.Balangan	Kab.Balangan	12 laporan	12 laporan	439,896,400	514,300,400	74,404,000	ABPD II	ABPD II
	Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsui Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah bangunan gedung untuk kepentingan strategis daerah kabupaten/kota yang dilakukan rehabilitasi, renovasi dan ubahsui	Jumlah bangunan gedung untuk kepentingan strategis daerah kabupaten/kota yang dilakukan rehabilitasi, renovasi dan ubahsui	Kab.Balangan	Kab.Balangan	Kab.Balangan	Kab.Balangan	21 unit	32 unit	48,458,862,000	49,255,102,000	796,240,000	ABPD II	ABPD II
	<b>PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA</b>	<b>Jumlah Bangunan yang ditata</b>	<b>Jumlah Bangunan yang ditata</b>	<b>Kab.Balangan</b>	<b>Kab.Balangan</b>	<b>Kab.Balangan</b>	<b>Kab.Balangan</b>	<b>6 buah</b>	<b>6 buah</b>	<b>26,102,635,100</b>	<b>28,397,765,100</b>	<b>2,295,130,000</b>	ABPD II	ABPD II
	<b>Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Bangunan yang ditata</b>	<b>Jumlah Bangunan yang ditata</b>	<b>Kab.Balangan</b>	<b>Kab.Balangan</b>	<b>Kab.Balangan</b>	<b>Kab.Balangan</b>	<b>6 buah</b>	<b>6 buah</b>	<b>26,102,635,100</b>	<b>28,397,765,100</b>	<b>2,295,130,000</b>	ABPD II	ABPD II
	Penataan Bangunan dan lingkungan	Jumlah pemeliharaan bangunan dan lingkungan dikawasan cagar budaya dan tradisional bersejarah, kawasan pariwisata, kawasan sistem perkotaan nasional dan kawasan strategis lainnya	Jumlah pemeliharaan bangunan dan lingkungan dikawasan cagar budaya dan tradisional bersejarah, kawasan pariwisata, kawasan sistem perkotaan nasional dan kawasan strategis lainnya	Kab.Balangan	Kab.Balangan	Kab.Balangan	Kab.Balangan	6 buah	24 kawasan	26,102,635,100	28,397,765,100	2,295,130,000	ABPD II	ABPD II
	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN</b>	<b>Persentase Jalan dalam kondisi mantap</b>	<b>Persentase kerusakan jalan</b>	<b>Kab.Balangan</b>	<b>Kab.Balangan</b>	<b>Kab.Balangan</b>	<b>Kab.Balangan</b>	<b>46,52%</b>	<b>46,52%</b>	<b>208,114,155,950</b>	<b>216,028,055,950</b>	<b>7,913,900,000</b>	DAK dan APBD II	DAK dan APBD II
	<b>Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota</b>	<b>Panjang Jalan yang diselenggarakan</b>	<b>Panjang Jalan yang diselenggarakan</b>	<b>Kab.Balangan</b>	<b>Kab.Balangan</b>	<b>Kab.Balangan</b>	<b>Kab.Balangan</b>	<b>22,75 km</b>	<b>21,75 Km</b>	<b>208,114,155,950</b>	<b>216,028,055,950</b>	<b>7,913,900,000</b>	<b>DAK dan APBD II</b>	<b>DAK dan APBD II</b>
	Rekonstruksi Jalan	Panjang jalan yang dilakukan rekonstruksi jalan	Panjang jalan yang dilakukan rekonstruksi jalan	Kab.Balangan	Kab.Balangan	Kab.Balangan	Kab.Balangan	20 km	19 KM	162,981,342,450	171,157,482,450	8,176,140,000	<b>DAK dan APBD II</b>	<b>DAK dan APBD II</b>
	Rehabilitasi Jalan	Panjang jalan yang direhabilitasi	Panjang jalan yang direhabilitasi	Kab.Balangan	Kab.Balangan	Kab.Balangan	Kab.Balangan	2 km	2 km	1,631,690,000	1,437,990,000	-193,700,000	ABPD II	ABPD II
	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang jalan yang dilakukan pemeliharaan secara rutin	Panjang jalan yang dilakukan pemeliharaan secara rutin	Kab.Balangan	Kab.Balangan	Kab.Balangan	Kab.Balangan	500 m	0,25 Km	2,840,766,000	1,400,066,000	-1,440,700,000	ABPD II	ABPD II
	Pembangunan Jembatan	Panjang jembatan yang dibangun	Panjang jembatan yang dibangun	Kab.Balangan	Kab.Balangan	Kab.Balangan	Kab.Balangan	400 m	400 m	30,650,750,000	32,585,930,000	1,935,180,000	ABPD II	ABPD II
	Rehabilitasi Jembatan	Panjang jembatan yang dilakukan rehabilitasi	Panjang jembatan yang dilakukan rehabilitasi	Kab.Balangan	Kab.Balangan	Kab.Balangan	Kab.Balangan	180 m	180 m	8,657,200,000	9,194,180,000	536,980,000	ABPD II	ABPD II
	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Panjang jembatan yang dilakukan pemeliharaan secara rutin	Panjang jembatan yang dilakukan pemeliharaan secara rutin	Kab.Balangan	Kab.Balangan	Kab.Balangan	Kab.Balangan	50 m	10 M	1,352,407,500	252,407,500	-1,100,000,000	ABPD II	ABPD II
	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI</b>	<b>Persentase jasa konstruksi yang terampil</b>	<b>Persentase jasa konstruksi yang terampil</b>	<b>Kab.Balangan</b>	<b>Kab.Balangan</b>	<b>Kab.Balangan</b>	<b>Kab.Balangan</b>	<b>50%</b>	<b>50%</b>	<b>4,894,996,000</b>	<b>4,942,696,000</b>	<b>47,700,000</b>	ABPD II	ABPD II
	<b>Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi</b>	<b>Tenaga terampil konstruksi yang bersertifikat</b>	<b>Tenaga terampil konstruksi yang bersertifikat</b>	<b>Kab.Balangan</b>	<b>Kab.Balangan</b>	<b>Kab.Balangan</b>	<b>Kab.Balangan</b>	<b>100 orang</b>	<b>20 orang</b>	<b>584,167,000</b>	<b>584,167,000</b>		ABPD II	ABPD II
	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah tenaga kerja konstruksi kualifikasi jabatan operator dan teknisi atau analis yang tersertifikasi	Jumlah tenaga kerja konstruksi kualifikasi jabatan operator dan teknisi atau analis yang tersertifikasi	Kab.Balangan	Kab.Balangan	Kab.Balangan	Kab.Balangan	100 orang	20 orang	584,167,000	584,167,000		ABPD II	ABPD II
	<b>Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Nilai capaian SPM SIPJAKI Kab/Kota</b>	<b>Nilai capaian SPM SIPJAKI Kab/Kota</b>	<b>Kab.Balangan</b>	<b>Kab.Balangan</b>	<b>Kab.Balangan</b>	<b>Kab.Balangan</b>	<b>85%</b>	<b>85%</b>	<b>140,069,000</b>	<b>140,069,000</b>		ABPD II	ABPD II
	Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah laporan penyelenggaraan dukungan manajemen sistem informasi jasa konstruksi	Jumlah laporan penyelenggaraan dukungan manajemen sistem informasi jasa konstruksi	Kab.Balangan	Kab.Balangan	Kab.Balangan	Kab.Balangan	2 laporan	2 laporan	140,069,000	140,069,000			

	<b>Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi</b>	<b>Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi</b>	<b>Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi</b>	Kab.Balangan	Kab.Balangan	Kab.Balangan	Kab.Balangan	1 dok	1 dok	4,170,760,000	4,218,460,000	47,700,000	ABPD II	ABPD II
	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah dokumen Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah dokumen Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Kab.Balangan	Kab.Balangan	Kab.Balangan	Kab.Balangan	1 dok	1 dok	4,170,760,000	4,218,460,000	47,700,000	ABPD II	ABPD II
	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG</b>	<b>Persentase ketersediaan dokumen NSPK penyelenggaraan penataan ruang</b>	<b>Persentase ketaatan RTRW</b>	Kab.Balangan	Kab.Balangan	Kab.Balangan	Kab.Balangan	96%	96%	1,744,745,900	2,034,639,200	289,893,300	ABPD II	ABPD II
	<b>Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah dokumen rencana tata ruang</b>	<b>Persentase kawasan yang memiliki RDTR</b>	Kab.Balangan	Kab.Balangan	Kab.Balangan	Kab.Balangan	85%	85%	752,428,100	952,369,800	199,941,700	ABPD II	ABPD II
	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen kebijakan perda /perkada selain RTRW kabupaten/kota	Jumlah dokumen kebijakan perda /perkada selain RTRW kabupaten/kota	Kab.Balangan	Kab.Balangan	Kab.Balangan	Kab.Balangan	1 dok	6 dok	752,428,100	952,369,800	199,941,700	ABPD II	ABPD II
	<b>Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah dokumen pelaksanaan persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang untuk kegiatan berusaha</b>	<b>Jumlah dokumen substansi sinkronisasi pemanfaatan ruang</b>	Kab.Balangan	Kab.Balangan	Kab.Balangan	Kab.Balangan	1 dok	1 dok	419,557,800	461,289,600	41,731,800	ABPD II	ABPD II
	Sistem Informasi Penataan Ruang	Jumlah data dan informasi yang dihasilkan dari Sistem Informasi Penataan Ruang	Jumlah data dan informasi yang dihasilkan dari Sistem Informasi Penataan Ruang	Kab.Balangan	Kab.Balangan	Kab.Balangan	Kab.Balangan	1 dok	1 dok	419,557,800	461,289,600	41,731,800	ABPD II	ABPD II
	<b>Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah dokumen substansi sinkronisasi pengendalian pemanfaatan ruang</b>	<b>Jumlah dokumen substansi sinkronisasi pengendalian pemanfaatan ruang</b>	Kab.Balangan	Kab.Balangan	Kab.Balangan	Kab.Balangan	1 dok	6 dok	572,760,000	620,979,800	48,219,800	ABPD II	ABPD II
	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah dokumen koordinasi pelaksanaan penataan ruang	Jumlah dokumen koordinasi pelaksanaan penataan ruang	Kab.Balangan	Kab.Balangan	Kab.Balangan	Kab.Balangan	1 dok	6 dok	572,760,000	620,979,800	48,219,800	ABPD II	ABPD II
	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN</b>									89,658,336,500	114,622,049,800	24,963,713,300	ABPD II	ABPD II
	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN</b>	<b>Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni</b>	<b>Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni</b>	Kab.Balangan	Kab.Balangan	Kab.Balangan	Kab.Balangan	100%	100%	594,694,600	549,098,600	-45,596,000	ABPD II	ABPD II
	<b>Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Data rumah layak huni yang rusak akibat korban bencana</b>	<b>Jumlah Data rumah layak huni yang rusak akibat korban bencana</b>	Kab.Balangan	Kab.Balangan	Kab.Balangan	Kab.Balangan	1 dok	1 dok	225,949,000	212,079,000	-13,870,000	ABPD II	ABPD II
	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen data rumah dilokasi rawan bencana dan lokasi yang berpotensi terkena relokasi program Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen data rumah dilokasi rawan bencana dan lokasi yang berpotensi terkena relokasi program Kabupaten/Kota	Kab.Balangan	Kab.Balangan	Kab.Balangan	Kab.Balangan	1 dok	1 dok	225,949,000	212,079,000	-13,870,000	ABPD II	ABPD II
	<b>Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah rumah rusak akibat korban bencana yang telah direhab dan dibangun</b>	<b>Jumlah rumah rusak akibat korban bencana yang telah direhab dan dibangun</b>	Kab.Balangan	Kab.Balangan	Kab.Balangan	Kab.Balangan	8 unit	8 unit	368,745,600	337,019,600	-31,726,000	ABPD II	ABPD II
	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/kota yang terehabilitasi	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/kota yang terehabilitasi	Kab.Balangan	Kab.Balangan	Kab.Balangan	Kab.Balangan	5 unit	5 unit	193,156,000	161,430,000	-31,726,000	ABPD II	ABPD II
	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/kota yang terbangun	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/kota yang terbangun	Kab.Balangan	Kab.Balangan	Kab.Balangan	Kab.Balangan	3 unit	3 unit	175,589,600	175,589,600		ABPD II	ABPD II
	<b>PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN</b>	<b>Persentase luasan permukiman kumuh dikawasan perkotaan yang tertangani</b>	<b>Luas kawasan kumuh yang tertangani</b>	Kab.Balangan	Kab.Balangan	Kab.Balangan	Kab.Balangan	3 Ha	3 Ha	4,577,050,400	4,603,709,900	26,659,500	ABPD II	ABPD II
	<b>Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha</b>	<b>Persentase Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 Ha</b>	<b>Persentase Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 Ha</b>	Kab.Balangan	Kab.Balangan	Kab.Balangan	Kab.Balangan	1	1	620,320,400	628,890,400	8,570,000	ABPD II	ABPD II
	Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	Jumlah dokumen Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	Jumlah dokumen Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	Kab.Balangan	Kab.Balangan	Kab.Balangan	Kab.Balangan	1 dok	1 dok	620,320,400	628,890,400	8,570,000	ABPD II	ABPD II
	<b>Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha</b>	<b>luas kawasan kumuh yang tertangani</b>	<b>Persentase luasan permukiman kumuh dikawasan perkotaan yang tertangani</b>	Kab.Balangan	Kab.Balangan	Kab.Balangan	Kab.Balangan	84,78%	84,78%	3,956,730,000	3,974,819,500	18,089,500	ABPD II	ABPD II

Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	Jumlah dokumen kesepakatan kerja sama dalam perbaikan rumah tidak layak huni beserta PSU	Jumlah dokumen kesepakatan kerja sama dalam perbaikan rumah tidak layak huni beserta PSU	Kab.Balangan	Kab.Balangan	Kab.Balangan	Kab.Balangan	16 dok	16 dok	3,956,730,000	3,974,819,500	18,089,500	ABPD II	ABPD II
<b>PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH</b>	<b>Cakupan ketersediaan rumah layak huni</b>	<b>Persentase rumah tidak layak huni</b>	<b>Kab.Balangan</b>	<b>Kab.Balangan</b>	<b>Kab.Balangan</b>	<b>Kab.Balangan</b>	<b>5,02%</b>	<b>5,02%</b>	<b>5,652,057,800</b>	<b>5,712,487,700</b>	<b>60,429,900</b>	<b>ABPD II</b>	<b>ABPD II</b>
<b>Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Rumah tidak layak huni di luar kawasan kumuh yang telah direhab</b>	<b>Jumlah rumah tidak layak huni pulih kembali</b>	<b>Kab.Balangan</b>	<b>Kab.Balangan</b>	<b>Kab.Balangan</b>	<b>Kab.Balangan</b>	<b>261 unit</b>	<b>262 unit</b>	<b>5,652,057,800</b>	<b>5,712,487,700</b>	<b>60,429,900</b>	<b>ABPD II</b>	<b>ABPD II</b>
Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha yang diperbaiki	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha yang diperbaiki	Kab.Balangan	Kab.Balangan	Kab.Balangan	Kab.Balangan	261 unit	262 unit	5,652,057,800	5,712,487,700	60,429,900	ABPD II	ABPD II
<b>PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)</b>	<b>Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU</b>	<b>Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU</b>	<b>Kab.Balangan</b>	<b>Kab.Balangan</b>	<b>Kab.Balangan</b>	<b>Kab.Balangan</b>	<b>87%</b>	<b>87%</b>	<b>78,834,533,700</b>	<b>103,756,753,600</b>	<b>24,922,219,900</b>	<b>ABPD II</b>	<b>ABPD II</b>
<b>Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan</b>	<b>Cakupan urusan penyelenggaraan PSU perumahan</b>	<b>Persentase kawasan yang memiliki PSU sesuai standar</b>	<b>Kab.Balangan</b>	<b>Kab.Balangan</b>	<b>Kab.Balangan</b>	<b>Kab.Balangan</b>	<b>87%</b>	<b>87%</b>	<b>78,834,533,700</b>	<b>103,756,753,600</b>	<b>24,922,219,900</b>	<b>ABPD II</b>	<b>ABPD II</b>
Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Jumlah dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Jumlah dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Kab.Balangan	Kab.Balangan	Kab.Balangan	Kab.Balangan	1 dok	1 dok	362,520,000	471,250,000	108,730,000	ABPD II	ABPD II
Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah lokasi perumahan nyang disediakan PSU yang menunjang fungsi hunian	Jumlah lokasi perumahan nyang disediakan PSU yang menunjang fungsi hunian	Kab.Balangan	Kab.Balangan	Kab.Balangan	Kab.Balangan	20 lokasi	20 lokasi	78,472,013,700	103,285,503,600	24,813,489,900	ABPD II	ABPD II

FORM 1

REKAPITULASI JUMLAH PROGRAM/KEGIATAN DAN PAGU PERUBAHAN RENCANA KERJA SKPD  
TAHUN 2023

NAMA SKPD : Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

NO	URUSAN	JUMLAH PROGRAM			JUMLAH KEGIATAN			JUMLAH PAGU			JUMLAH PROGRAM BARU	JUMLAH KEGIATAN BARU	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		RENJA 2023	DPA APBD 2023	RENJA 2023 PERUBAHAN	RENJA 2023	DPA APBD 2023	RENJA 2023 PERUBAHAN	RENJA 2023	DPA APBD 2023	RENJA 2023 PERUBAHAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=5-3	13=8-6	14
	<i>Wajib Pelayanan Dasar</i>	13	13	13	28	28	28	516,311,192,617	516,311,192,617	572,082,979,723	0	1	DISPUPRPERKIM

Kepala Dinas



RAHMADIAH, ST,MT  
NIP.19760309 200604 2 007

REKAPITULASI DAFTAR PERUBAHAN PROGRAM DAN PERUBAHAN KEGIATAN PADA  
RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN TAHUN 2023

NAMA SKPC: Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

No.	URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET		PAGU	
		SEMULA	MENJADI		RENJA 2023	RENJA 2023 PERUBAHAN	RENJA 2023	RENJA 2023 PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN					
		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				516,311,192,617	572,082,979,723
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				426,652,856,117	457,460,929,923
1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Sakip SKPD	66	66	22,583,326,167	23,090,935,173
1		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja	2 dok	2 dok	104,640,000	189,284,000
	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	2 dok	2 dok	71,750,000	96,248,000
	2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	2 dok	2 dok	32,890,000	93,036,000
2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Pembayaran Gaji PNS dan Laporan Keuangan	14 bulan	14 bulan	10,707,271,867	10,658,932,023
	3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	64 orang	64 orang	10,059,476,951	9,995,910,111
	4	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	12 dok	12 dok	19,174,916	20,501,912
	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	3 laporan	3 laporan	628,620,000	642,520,000



3		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Peningkatan disiplin aparatur</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>574,149,000</b>	<b>594,399,000</b>
	6	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian Dinas beserta Atribut kelengkapan	195 lembar	180 lembar	68,250,000	58,500,000
	7	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	60 orang	76 orang	505,899,000	535,899,000
4		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Administrasi umum perangkat daerah yang dilaksanakan</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>1,941,642,500</b>	<b>2,368,842,100</b>
	8	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	9 paket	15 paket	245,304,000	595,627,600
	9	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	600 paket	600 paket	135,560,000	164,760,000
	10	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1 paket	1 paket	500,558,500	500,558,500
	11	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	12 dok	12 dok	24,400,000	24,400,000
	12	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 laporan	12 laporan	1,035,820,000	1,083,496,000
5		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan administrasi pelayanan SOPD dan Persentase pemenuhan sarana dan prasarana SOPD</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>5,200,000,000</b>	<b>5,519,083,900</b>
	13	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit kendaraan Dinas operasional atau lapangan yang disediakan	1 unit	1 unit	550,000,000	550,000,000
	14	Pengadaan Alat Besar	Pengadaan Alat Besar	Jumlah unit alat besar yang disediakan	3 unit	3 unit	4,650,000,000	4,650,000,000
	15		Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan		4 paket		319,083,900
6		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan administrasi pelayanan, sarana dan prasarana SOPD</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>1,906,362,100</b>	<b>1,881,986,900</b>
	16	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 laporan	12 laporan	678,000,000	619,730,000
	17	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 laporan	12 laporan	1,228,362,100	1,262,256,900
7		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan Pemeliharaan sarana dan prasarana SOPD</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>2,149,260,700</b>	<b>1,878,407,250</b>
	18	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	8 unit	8 unit	650,777,450	654,257,450

	19	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	7 unit	7 unit	142,467,500	142,467,500
	20	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	2 unit	4 unit	1,356,015,750	1,081,682,300
2		<b>PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)</b>	<b>Persentase jaringan irigasi yang berfungsi baik</b>	<b>28,31%</b>	<b>31,57%</b>	<b>36,567,969,200</b>	<b>51,186,460,100</b>
8		<b>Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase tebing rusak</b>	<b>13,03%</b>	<b>14,68%</b>	<b>25,492,657,900</b>	<b>33,251,550,400</b>
	21	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah embung dan penampung air lainnya yang dibangun	8 unit	19 unit	3,440,190,000	4,910,250,000
	22	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	Panjang bangunan perkuatan tebing yang dibangun	120 meter	3420 meter	20,620,707,100	26,762,788,000
	23	Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Jumlah pintu air/bendung pengendali banjir yang direhabilitasi	5 unit	4 unit	1,155,120,000	1,155,120,000
	24	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah peserta yang mengikuti pembinaan dan pemberdayaan kelembagaan pengelolaan SDA kewenangan Kabupaten/Kota	50 orang	100 orang	276,640,800	423,392,400
9		<b>Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase saluran irigasi dalam kondisi baik</b>	<b>28,31%</b>	<b>31,57%</b>	<b>11,075,311,300</b>	<b>17,934,909,700</b>
	25	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang jaringan irigasi permukaan yang ditingkatkan	300 meter	3480 meter	4,285,110,000	6,991,590,000
	26	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang jaringan irigasi permukaan yang dioperasikan dan dipelihara	200 meter	1320 meter	2,654,181,300	5,225,339,700
	27	Rehabilitasi jaringan irigasi permukaan	Rehabilitasi jaringan irigasi permukaan	Panjang jaringan irigasi permukaan yang direhabilitasi	100 meter	3420 meter	4,136,020,000	5,717,980,000
3		<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM</b>	<b>Persentase rumah tangga yang terakses air bersih layak</b>	<b>83,27%</b>	<b>86,89%</b>	<b>16,427,693,000</b>	<b>16,814,803,000</b>
10		<b>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah RT yang terhubung dengan air perpipaan</b>	<b>100 RT</b>	<b>100 RT</b>	<b>16,427,693,000</b>	<b>16,814,803,000</b>
	28	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Peningkatan kapasitas SPAM IKK/perkotaan atau SPAM tematik tertentu	5000 liter/detik	5000 liter/detik	9,044,640,000	9,431,750,000

	29	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah Penambahan sambungan rumah yang terlayani melalui Pemanfaatan Idle Capacity dengan penambahan jaringan perpipaan pada SPAM IKK/Perdesaan atau SPAM Tematik Tertentu	1257 SR	1257 SR	7,383,053,000	7,383,053,000
4		<b>PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL</b>	<b>Persentase pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan yang baik</b>	<b>80%</b>	<b>80%</b>	<b>1,924,500,000</b>	<b>1,924,500,000</b>
12		<b>Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di</b>	<b>Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di</b>	<b>Persentase pembangunan bangunan persampahan</b>	<b>75%</b>	<b>75%</b>	<b>1,924,500,000</b>	<b>1,924,500,000</b>
	30	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	600 rumah tangga	600 rumah tangga	1,924,500,000	1,924,500,000
4		<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH</b>	<b>Persentase rumah tangga yang terakses sanitasi layak</b>	<b>93,76%</b>	<b>99,98%</b>	<b>12,627,348,200</b>	<b>13,071,528,400</b>
13		<b>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase RT yang limbah domestik terkelola dengan baik</b>	<b>93,76%</b>	<b>99,98%</b>	<b>12,627,348,200</b>	<b>13,071,528,400</b>
	31	Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Jumlah rumah tangga yang memiliki tangki septik	500 rumah tangga	501 rumah tangga	12,322,826,000	12,712,786,000
	32	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah unit sistem pengelolaan air limbah domestik yang dioperasikan dan dipelihara	1 unit	1 unit	304,522,200	358,742,400
5		<b>PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG</b>	<b>PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG</b>	<b>Persentase bangunan/gedung sesuai standart</b>	<b>89,60%</b>	<b>89,60%</b>	<b>95,665,486,600</b>	<b>99,969,547,000</b>
14		<b>Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik</b>	<b>Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan</b>	<b>Persentase bangunan/gedung publik dalam kondisi baik</b>	<b>22 buah</b>	<b>89,60%</b>	<b>95,665,486,600</b>	<b>99,969,547,000</b>
	33	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen perencanaan, pembangunan, pengawasan dan pemanfaatan bangunan gedung daerah Kabupaten/Kota	22 dok	140 dok	46,766,728,200	50,200,144,600
	34	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi penyelenggaraan bangunan gedung negara daerah kabupaten/kota	12 laporan	12 laporan	439,896,400	514,300,400
	35	Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsui Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsui Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah bangunan gedung untuk kepentingan strategis daerah kabupaten/kota yang dilakukan rehabilitasi, renovasi dan ubah suai	21 unit	32 unit	48,458,862,000	49,255,102,000
6		<b>PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA</b>	<b>PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA</b>	<b>Jumlah bangunan yang ditata</b>	<b>6 buah</b>	<b>6 buah</b>	<b>26,102,635,100</b>	<b>28,397,765,100</b>

15		<b>Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Bangunan yang ditata</b>	<b>6 buah</b>	<b>6 buah</b>	<b>26,102,635,100</b>	<b>28,397,765,100</b>
	36	Penataan Bangunan dan lingkungan	Penataan Bangunan dan lingkungan	Jumlah pemeliharaan bangunan dan lingkungan dikawasan cagar budaya dan tradisional bersejarah, kawasan pariwisata, kawasan sistem perkotaan nasional dan kawasan strategis lainnya	6 buah	24 kawasan	26,102,635,100	28,397,765,100
7		<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN</b>	<b>Persentase kerusakan jalan</b>	<b>46,52%</b>	<b>46,52%</b>	<b>208,114,155,950</b>	<b>216,028,055,950</b>
16		<b>Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota</b>	<b>Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota</b>	<b>Panjang Jalan yang diselenggarakan</b>	<b>22,75 km</b>	<b>21,75 Km</b>	<b>208,114,155,950</b>	<b>216,028,055,950</b>
	37	Rekonstruksi Jalan	Rekonstruksi Jalan	Panjang jalan yang dilakukan rekonstruksi jalan	20 km	19 KM	162,981,342,450	171,157,482,450
	38	Rehabilitasi Jalan	Rehabilitasi Jalan	Panjang jalan yang direhabilitasi	2 km	2 km	1,631,690,000	1,437,990,000
	39	Pemeliharaan Rutin Jalan	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang jalan yang dilakukan pemeliharaan secara rutin	500 m	0,25 Km	2,840,766,000	1,400,066,000
	40	Pembangunan Jembatan	Pembangunan Jembatan	Panjang jembatan yang dibangun	400 m	400 m	30,650,750,000	32,585,930,000
	41	Rehabilitasi Jembatan	Rehabilitasi Jembatan	Panjang jembatan yang dilakukan rehabilitasi	180 m	180 m	8,657,200,000	9,194,180,000
	42	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Panjang jembatan yang dilakukan pemeliharaan secara rutin	50 m	10 M	1,352,407,500	252,407,500
8		<b>PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI</b>	<b>Persentase jasa konstruksi yang terampil</b>	<b>50%</b>	<b>50%</b>	<b>4,894,996,000</b>	<b>4,942,696,000</b>
17		<b>Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi</b>	<b>Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi</b>	<b>Tenaga terampil konstruksi yang bersertifikat</b>	<b>100 orang</b>	<b>20 orang</b>	<b>584,167,000</b>	<b>584,167,000</b>
	43	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah tenaga kerja konstruksi kualifikasi jabatan operator dan teknisi atau analis yang tersertifikasi	100 orang	20 orang	584,167,000	584,167,000
18		<b>Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Nilai capaian SPM SIPJAKI Kab/Kota</b>	<b>85%</b>	<b>85%</b>	<b>140,069,000</b>	<b>140,069,000</b>
	44	Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah laporan penyelenggaraan dukungan manajemen sistem informasi jasa konstruksi	2 laporan	2 laporan	140,069,000	140,069,000
19		<b>Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi</b>	<b>Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi</b>	<b>Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi</b>	<b>1 dok</b>	<b>1 dok</b>	<b>4,170,760,000</b>	<b>4,218,460,000</b>
	45	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah dokumen Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	1 dok	1 dok	4,170,760,000	4,218,460,000
9		<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG</b>	<b>Persentase ketaatan RTRW</b>	<b>96%</b>	<b>96%</b>	<b>1,744,745,900</b>	<b>2,034,639,200</b>

20		<b>Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota</b>	<b>Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase kawasan yang memiliki RDTR</b>	<b>85%</b>	<b>85%</b>	<b>752,428,100</b>	<b>952,369,800</b>
	46	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen kebijakan perda /perkada selain RTRW kabupaten/kota	1 dok	6 dok	752,428,100	952,369,800
21		<b>Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah dokumen pelaksanaan persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang untuk kegiatan</b>	<b>1 dok</b>	<b>1 dok</b>	<b>419,557,800</b>	<b>461,289,600</b>
	47	Sistem Informasi Penataan Ruang	Sistem Informasi Penataan Ruang	Jumlah data dan informasi yang dihasilkan dari Sistem Informasi Penataan Ruang	1 dok	1 dok	419,557,800	461,289,600
22		<b>Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah dokumen substansi sinkronisasi pengendalian pemanfaatan ruang</b>	<b>1 dok</b>	<b>6 dok</b>	<b>572,760,000</b>	<b>620,979,800</b>
	48	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah dokumen koordinasi pelaksanaan penataan ruang	1 dok	6 dok	572,760,000	620,979,800
		<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN</b>				<b>89,658,336,500</b>	<b>114,622,049,800</b>
10		<b>PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN</b>	<b>Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>594,694,600</b>	<b>549,098,600</b>
23		<b>Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota</b>	<b>Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Data rumah layak huni yang rusak akibat korban bencana</b>	<b>1 dok</b>	<b>1 dok</b>	<b>225,949,000</b>	<b>212,079,000</b>
	49	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen data rumah dilokasi rawan bencana dan lokasi yang berpotensi terkena relokasi program Kabupaten/Kota	1 dok	1 dok	225,949,000	212,079,000
24		<b>Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota</b>	<b>Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah rumah rusak akibat korban bencana yang telah direhab dan dibangun</b>	<b>8 unit</b>	<b>8 unit</b>	<b>368,745,600</b>	<b>337,019,600</b>
	50	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/kota yang terehabilitasi	5 unit	5 unit	193,156,000	161,430,000
	51	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/kota yang terbangun	3 unit	3 unit	175,589,600	175,589,600
11		<b>PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN</b>	<b>PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN</b>	<b>Luas kawasan kumuh yang tertangani</b>	<b>3 Ha</b>	<b>3 Ha</b>	<b>4,577,050,400</b>	<b>4,603,709,900</b>
25		<b>Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha</b>	<b>Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha</b>	<b>Luas kawasan kumuh yang tertangani</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>620,320,400</b>	<b>628,890,400</b>
	52	Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	Jumlah dokumen Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	1 dok	1 dok	620,320,400	628,890,400

26		<b>Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha</b>	<b>Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha</b>	<b>Persentase luasan permukiman kumuh dikawasan perkotaan yang tertangani</b>	<b>84,78%</b>	<b>84,78%</b>	<b>3,956,730,000</b>	<b>3,974,819,500</b>
	53	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	Jumlah dokumen kesepakatan kerja sama dalam perbaikan rumah tidak layak huni beserta PSU	16 dok	16 dok	3,956,730,000	3,974,819,500
12		<b>PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH</b>	<b>PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH</b>	<b>Persentase rumah tidak layak huni</b>	<b>5,02%</b>	<b>5,02%</b>	<b>5,652,057,800</b>	<b>5,712,487,700</b>
27		<b>Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah rumah tidak layak huni pulih kembali</b>	<b>261 unit</b>	<b>262 unit</b>	<b>5,652,057,800</b>	<b>5,712,487,700</b>
	54	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha yang diperbaiki	261 unit	262 unit	5,652,057,800	5,712,487,700
13		<b>PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)</b>	<b>Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU</b>	<b>87%</b>	<b>87%</b>	<b>78,834,533,700</b>	<b>103,756,753,600</b>
28		<b>Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan</b>	<b>Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan</b>	<b>Persentase kawasan yang memiliki PSU sesuai standar</b>	<b>87%</b>	<b>87%</b>	<b>78,834,533,700</b>	<b>103,756,753,600</b>
55		Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Jumlah dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	1 dok	1 dok	362,520,000	471,250,000
56		Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah lokasi perumahan yang disediakan PSU yang menunjang fungsi hunian	20 lokasi	20 lokasi	78,472,013,700	103,285,503,600